

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran serta analisa atas jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tidak terintegrasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan di Provinsi Gorontalo yaitu kebijakan/peraturan di daerah terkait pengarusutamaan gender (PUG) tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak diterapkannya analisis gender dalam perencanaan pembangunan daerah, belum terbentuk Kelompok Kerja (POKJA) PUG, dan ketersediaan data terpisah berdasarkan jenis kelamin di semua instansi pemerintah daerah masih terbatas.
2. Kebijakan pemerintah daerah kedepan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mencapai pemenuhan hak perempuan dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo seharusnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagai pijakan hukum untuk melaksanakan segala ketentuan dalam upaya memenuhi hak perempuan dalam menerima manfaat pembangunan.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Kepada pemerintah daerah agar segera menyusun serta menerbitkan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada berbagai regulasi yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat implementasi PUG dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Kepada seluruh instansi pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Gorontalo untuk dengan profesional menjalankan tanggung jawab sebagai abdi Negara sekaligus masyarakat dalam mengintegrasikan gender pada penyusunan program/kegiatan agar tepat sasaran.
3. Kepada LSM lokal yang fokus pada pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo agar tetap mengawal segala kebijakan daerah terkait PUG agar

tetap konsisten dan sesuai dengan komitmen bersama dalam pemenuhan hak perempuan.

